

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.673056/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01
Tanggal : 22 Februari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
- 3. Provinsi : (26) BENGKULU
- 4. Kode/Nama Satker : (673056) PENGADILAN NEGERI TUBEI
- Sebesar : Rp. 59.509.000 (LIMA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 59.509.000
Rp. 59.509.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 59.509.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP | | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN C U R U P (146) Rp. 59.509.000

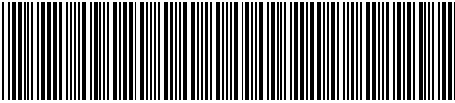
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.673056/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7394-5065-9976-1095

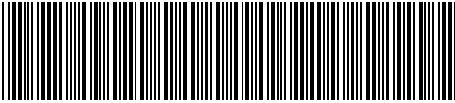
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (673056) PENGADILAN NEGERI TUBEI

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			59.509.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			59.509.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.AEA	Koordinasi	2,00	kegiatan	4.800.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	2.00	kegiatan	4.800.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	92,00	Perkara, Berkas Perkara	30.709.000
Rincian Output	:	01 BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	92.00	Perkara	30.709.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	10,00	Orang	24.000.000
Rincian Output	:	01 QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	10.00	Orang	24.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.673056/2025
I B. SUMBER DANA



DS:7394-5065-9976-1095

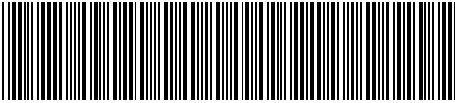
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (673056) PENGADILAN NEGERI TUBEI

				Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	59.509.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	59.509.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.673056/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7394-5065-9976-1095

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (673056) PENGADILAN NEGERI TUBEI
Kewenangan : (KD)

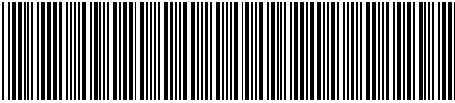
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7		9	10
673056	PENGADILAN NEGERI TUBEI	-	59.509	-	-	-	59.509	26 . 07	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	59.509	-	-	-	59.509		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	59.509	-	-	-	59.509		
1049.AEA	Koordinasi (26.07 BENGKULU / KAB. LEBONG)	-	4.800	-	-	-	4.800		
01	RM	-	4.800	-	-	-	4.800		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (26.07 BENGKULU / KAB. LEBONG)	-	30.709	-	-	-	30.709		
01	RM	-	30.709	-	-	-	30.709		
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (26.07 BENGKULU / KAB. LEBONG)	-	24.000	-	-	-	24.000	26 . 07	
01	RM	-	24.000	-	-	-	24.000	146	
JUMLAH		-	59.509	-	-	-	59.509		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.673056/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7394-5065-9976-1095

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (26) BENGKULU
Kode>Nama Satker : (673056) PENGADILAN NEGERI TUBEI

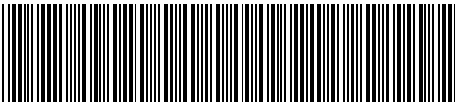
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	673056	PENGADILAN NEGERI TUBEI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	4.824	4.824	4.824	4.824	4.824	4.859	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081	5.126	59.509
		BELANJA BARANG	4.824	4.824	4.824	4.824	4.824	4.859	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081	5.126	59.509
		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	4.824	4.824	4.824	4.824	4.824	4.859	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081	5.126	59.509
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	4.824	4.824	4.824	4.824	4.824	4.859	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081	5.126	59.509
		PERKIRAAN PENERIMAAN	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	625	7.386
		- PNBP (425232)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	25	190
		- PNBP (425233)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500
005.03.BF.1049	- PNBP (425239)	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	6.696	

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.673056/2025
IV A. B L O K I R



DS:7394-5065-9976-1095

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [673056] PENGADILAN NEGERI TUBEI

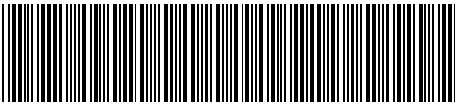
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
673056	PENGADILAN NEGERI TUBEI Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 23.673 52 Belanja Barang Rp. 23.673		
005.03.BF 1049	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
1049.AEA	Koordinasi 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600 Blokir perjadiin Transport KIMWASMAT Disposisi: Penghematan/pemotongan		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 580 Blokir Pengiriman Penetapan Hari Sidang Disposisi: Penghematan/pemotongan 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.223 Blokir Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara Disposisi: Penghematan/pemotongan 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.770 Pemblokiran ATK Disposisi: Penghematan/pemotongan 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 500 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.673056/2025
IV B. C A T A T A N



DS:7394-5065-9976-1095

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [26] BENGKULU
Kode dan Nama Satker : [673056] PENGADILAN NEGERI TUBEI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002